



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TEGUH SUBROTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BURHANUDDIN
Jabatan : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025,

Pihak Kedua,

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

(BURHANUDDIN)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,



(TEGUH SUBROTO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.692.179.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 29.215.571.000
Jumlah		Rp 31.907.750.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Jakarta, 30 Januari 2025,

Pihak Kedua,

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


(BURHANUDDIN)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU,


(TEGUH SUBROTO, S.H., M.H.)





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU PRAMESTIE, S.H.,M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

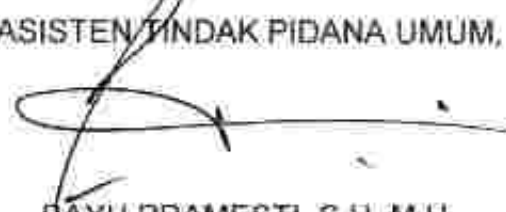
Nama : JEHEZKIEL DEVY SUDARSO, S.H.,CN
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025
Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,

BAYU PRAMESTI, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

J. DEVY SUDARSO
Jaksa Utama Madya



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	220
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan di wilayah Kejaksaan	-

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tinggi Kepulauan Riau	
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	-

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pra Penuntutan Perkara Pidum	Rp 510.810.000,-
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidum	Rp 86.845.000,-
	Jumlah	Rp 597.655.000,-


D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU



J. DEY SUDARSO
Jaksa Utama Medya

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,



BAYU PRAMESTI, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARYO NUGROHO, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI D PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAYU PRAMESTI, S.H.,M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,


BAYU PRAMESTI, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI D,


HARYO NUGROHO, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI D PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	220
		Persentase perkara tindak pidana	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		umum yang diproses hingga Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	-

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pra Penuntutan Perkara Pidum	Rp 510.810.000,-
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidum	Rp 86.845.000,-
	Jumlah	Rp 597.655.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,


BAYU PRAMESTI, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI D,


HARYO NUGROHO, S.H., M.H.
JAKSA MADYA



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : ALINAEX HSB, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI C PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAYU PRAMESTI, S.H.,M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Seiaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,

BAYU PRAMESTI, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI C,

ALINAEX HSB, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI C PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	220
		Persentase perkara tindak pidana	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		umum yang diproses hingga Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum.	-

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pra Penuntutan Perkara Pidum	Rp 510.810.000,-
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidum	Rp 86.845.000,-
	Jumlah	Rp 597.655.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,

BAYU PRAMESTI, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI C,

ALINAEX HSB, S.H., M.H.
JAKSA MADYA



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FRENGKY MANURUNG, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI B PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAYU PRAMESTI, S.H.,M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI B,

FRENGKY MANURUNG, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA

Pihak Kedua,

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,

BAYU PRAMESTI, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI B PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	220
		Persentase perkara tindak pidana	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		umum yang diproses hingga Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	-

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pra Penuntutan Perkara Pidum	Rp 510.810.000,-
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidum	Rp 86.845.000,-
	Jumlah	Rp 597.655.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,

BAYU PRAMESTI, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI B,

FRENGKY MANURUNG, S.H., M.H.
JAKSA MADYA



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIAN DESTAMI, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI A PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAYU PRAMESTI, S.H.,M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI A,

Pihak Kedua,
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,


BAYU PRAMESTI, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA


RIAN DESTAMI, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI A PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif.	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	220
		Persentase perkara tindak pidana	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		umum yang diproses hingga Penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewusjdezaak</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	-
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	-

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pra Penuntutan Perkara Pidum	Rp 510.810.000,-
2	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidum	Rp 86.845.000,-
	Jumlah	Rp 597.655.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, Januari 2025


Pihak Kedua,

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,


BAYU PRAMESTI, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI A,


RIAN DESTAMI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAIFULLAH, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JEHEZKIEL DEVY SUDARSO, S.H., CN.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU



(J. DEVY SUDARSO)

Pihak Pertama,

ASISTEN PENGAWASAN,



(SYAIFULLAH)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI	Persentase Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang memperoleh predikat AKIP minimal A	20%
2	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Jumlah ASN di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang dijatuhi hukuman disiplin	2

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Terselenggaranya Kejaksaan RI sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Persentase satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	20%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Inspeksi Umum	Rp147.685.000
2	Inspeksi Pemantauan	Rp 81.615.000
3	Audit dan Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	Rp 30.700.000
4	Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi	Rp 34.120.000
5	Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus	Rp 40.247.000
6	Audit Perhitungan Kerugian Negara	Rp 29.900.000
7	Inspeksi Pemeriksaan Keuangan	Rp129.775.000
	Jumlah	Rp494.042.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

(J. DEMY SUDARSO)

Pihak Pertama,

ASISTEN PENGAWASAN,

(SYAIFULLAH)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FRENGKY HASUDUNGAN PASARIBU, S.H., M.Hum.
Jabatan : PEMERIKSA KEUANGAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,
ASISTEN PENGAWASAN,

(SYAIFULLAH, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
PEMERIKSA KEUANGAN,

(FRENGKY HASUDUNGAN PASARIBU, S.H., M.Hum.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA KEUANGAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pemeriksaan Pengawasan terkait Keuangan pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sesuai dengan Program Kerja Pengawasan dan Kebijakan Pimpinan.	Penyusunan Rencana dan Program Kerja sebagai dasar dalam Pelaksanaan Inspeksi Khusus Keuangan pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta Penyusunan Laporan Inspeksi Khusus Keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.	1 Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.	Pelaksanaan Pemantauan / reviu Laporan terkait Keuangan pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan / Reviu.	1 Kegiatan
3.	Pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan tindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana.	Kegiatan Penanganan Laporan Pengaduan baik yang ditindaklanjuti melalui Klarifikasi maupun Inspeksi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan aturan yang berlaku, serta Penyusunan Laporan Hasil Klarifikasi dan Laporan Hasil Inspeksi Kasus.	2 Kegiatan
4.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Penyusunan Laporan Berkala terkait Keuangan	Data terkait Keuangan, yang akan digunakan sebagai bahan laporan berkala dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala terkait Keuangan	1 Kegiatan
5.	Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu terkait Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan Pengawasan untuk tujuan tertentu (Audit) dan Penyusunan Laporan Hasil Audit	2 Kegiatan

No	Rincian Output	Anggaran
1.	Laporan Inspeksi Khusus Keuangan	Rp129.775.000,-
2.	Laporan Hasil Reviu	Rp30.700.000,-
3.	Laporan Hasil Klarifikasi	Rp34.120.000,-
	Laporan Hasil Inspeksi Kasus	Rp40.247.000,-
4.	Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev)	-
5.	Laporan Hasil Audit	Rp29.900.000,-
	Jumlah	Rp264.742.000,-


D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,
ASISTEN PENGAWASAN,


(SYAIFULLAH, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
PEMERIKSA KEUANGAN,


(FRENGKY HASUDUNGAN PASARIBU, S.H., M.Hum.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Teuku Syahroni, S.E., S.H., M.H.
Jabatan : Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syaifulah, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,


(Syaifulah, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara,


(Teuku Syahroni, S.E., S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara
Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pemeriksaan pengawasan terkait perdata dan tata usaha negara pada satuan kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sesuai dengan program kerja pengawasan dan kebijakan pimpinan.	Penyusunan rencana dan program kerja sebagai dasar dalam pelaksanaan inspeksi umum dan pemantauan pada satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta penyusunan petunjuk penertiban (Juktib) atas inspeksi umum dan pemantauan yang telah dilaksanakan	2 Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.	Pelaksanaan pemantauan atas tindaklanjut Juktib pada satuan kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Tindaklanjut juktib pada satuan kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	1 Kegiatan
3.	Pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana	Kegiatan penanganan laporan pengaduan baik yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi maupun inspeksi kasus di kejaksaan tinggi kepulauan riau sesuai dengan aturan yang berlaku, serta penyusunan laporan hasil klarifikasi dan laporan hasil inspeksi kasus	2 Kegiatan
4.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) serta penyusunan laporan berkala terkait perdata dan tata usaha negara	Data terkait perdata dan tata usaha negara yang akan digunakan sebagai bahan laporan berkala dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi (monev) berkala	1 Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Inspeksi Umum	Rp147.685.000
2.	Pelaksanaan Pemantauan	Rp81.615.000
3.	Pelaksanaan Hasil Klarifikasi	Rp34.120.000
4.	Pelaksanaan Hasil Inspeksi Kasus	Rp40.247.000
5.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev)	-
Jumlah		Rp303.667.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

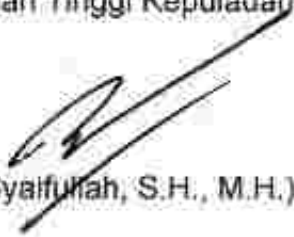
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025


Pihak Kedua,

Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,


(Syaifulhah, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara,


(Teuku Syahroni, S.E., S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novrika, S.H., M.H.
Jabatan : Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Militer

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syaifullah, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,

(Syaifullah, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan
Tindak Pidana Militer,

(Novrika, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara
Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pemeriksaan pengawasan terkait tindak pidana khusus dan tindak pidana militer pada satuan kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sesuai dengan program kerja pengawasan dan kebijakan pimpinan.	Penyusunan rencana dan program kerja sebagai dasar dalam pelaksanaan inspeksi umum dan pemantauan pada satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta penyusunan petunjuk penertiban (Juktib) atas inspeksi umum dan pemantauan yang telah dilaksanakan	2 Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.	Pelaksanaan pemantauan atas tindaklanjut Juktib pada satuan kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Tindaklanjut juktib pada satuan kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	1 Kegiatan
3.	Pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana	Kegiatan penanganan laporan pengaduan baik yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi maupun inspeksi kasus di kejaksaan tinggi kepulauan riau sesuai dengan aturan yang berlaku, serta penyusunan laporan hasil klarifikasi dan laporan hasil inspeksi kasus	2 Kegiatan
4.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) serta penyusunan laporan berkala terkait tindak pidana khusus dan tindak pidana militer	Data tindak pidana khusus dan tindak pidana militer yang akan digunakan sebagai bahan laporan berkala dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi (monev) berkala	1 Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Inspeksi Umum	Rp147.685.000
2.	Pelaksanaan Pemantauan	Rp81.615.000
3.	Pelaksanaan Hasil Klarifikasi	Rp34.120.000
4.	Pelaksanaan Hasil Inspeksi Kasus	Rp40.247.000
5.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev)	-
Jumlah		Rp303.667.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN


1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,


(Syaifulah, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus dan
Tindak Pidana Mirip,


(Navri, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I MADE AGUS PUTRA ADNYANA, S.H., M.H.
Jabatan : PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN
RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN PENGAWASAN,

(SYAIFULLAH, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM
DAN PEMULIHAN ASET,

(I MADE AGUS P. ADNYANA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan Inspeksi umum	Penyusunan Rencana dan Program Kerja sebagai dasar dalam Pelaksanaan Inspeksi Umum pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta Penyusunan Juktib yang dilaksanakan sesuai dengan	1 Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		pedoman yang telah ditetapkan.	
2	Pelaksanaan Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan.	1 Kegiatan
3	Pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana.	Kegiatan Penanganan Laporan Pengaduan baik yang ditindaklanjuti melalui Klarifikasi maupun Inspeksi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan aturan yang berlaku, serta Penyusunan Laporan Hasil Klarifikasi dan Laporan Hasil Inspeksi Kasus.	2 Kegiatan
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Tindak Pidana Umum dan Pemulihan Aset.	Data terkait tindak pidana umum dan pemulihan aset, yang akan digunakan sebagai bahan laporan berkala dan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).	1 Kegiatan

No	Rincian Output	Anggaran
1	Inspeksi Umum	Rp147.685.000
2	Inspeksi Pemantauan	Rp 81.615.000
3	Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi	Rp 34.120.000
4	Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus	Rp 40.247.000
	Jumlah	Rp 303.647.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN PENGAWASAN,

(SYAIFULLAH, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM
DAN PEMULIHAN ASET,

(I. MADE AGUS P. ADNYANA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYU HIDAYAT, S.H., M.H.
Jabatan : PEMERIKSA INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN
RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAIFULLAH, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN
RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN PENGAWASAN,

(SYAIFULLAH, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

PEMERIKSA INTELIJEN,

(WAHYU HIDAYAT, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI	Persentase Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang memperoleh predikat AKIP minimal A	20%
2	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Jumlah ASN di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang dijatuhi hukuman disiplin	2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Terselenggaranya Kejaksaan RI sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Persentase satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	20%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Inspeksi Umum	Rp147.685.000
2	Inspeksi Pemantauan	Rp 81.615.000
3	Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Klarifikasi	Rp 34.120.000
4	Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti Melalui Inspeksi Kasus	Rp 40.247.000
Jumlah		

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN PENGAWASAN,

PEMERIKSA INTELIJEN,

(SYAIFULLAH, S.H., M.H.)

(WAHYU HIDAYAT, S.H., M.H.)





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maruhum, S.H., M.H.
Jabatan : Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syaifullah, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,

(Syaifullah, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum,

(Maruhum, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum
Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pemeriksaan pengawasan terkait kepegawaian dan tugas umum pada satuan kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sesuai dengan program kerja pengawasan dan kebijakan pimpinan.	Penyusunan rencana dan program kerja sebagai dasar dalam pelaksanaan inspeksi umum dan pemantauan pada satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta penyusunan petunjuk penertiban (Juklib) atas inspeksi umum dan pemantauan yang telah dilaksanakan.	2 Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2.	Pelaksanaan pemantauan atas tindaklanjut Juktib pada satuan kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Tindaklanjut juktib pada satuan kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	1 Kegiatan
3.	Pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana	Kegiatan penanganan laporan pengaduan baik yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi maupun inspeksi kasus di kejaksaan tinggi kepulauan riau sesuai dengan aturan yang berlaku, serta penyusunan laporan hasil klarifikasi dan laporan hasil inspeksi kasus	2 Kegiatan
4.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) serta penyusunan laporan berkala terkait kepegawaian dan tugas umum	Data terkait kepegawaian dan tugas umum negara yang akan digunakan sebagai bahan laporan berkala dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi (monev) berkala	1 Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Inspeksi Umum	Rp147.685.000
2.	Pelaksanaan Pemantauan	Rp81.615.000
3.	Pelaksanaan Hasil Klarifikasi	Rp34.120.000
4.	Pelaksanaan Hasil Inspeksi Kasus	Rp40.247.000
5.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev)	-
Jumlah		Rp303.667.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

(Syaffullah, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum.

(Marhum, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JEHEZKIEL DEVY SUDARSO, S.H., CN.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU



(J.DEVY SUDARSO)

Pihak Pertama,

ASISTEN PEMBINAAN,



(ATIK RUSMIATY AMBARSARI)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Persentase satuan Kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	70%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%
2	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah Satker di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	2

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	50%
4	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Persentase satuan kerja yang telah melaksanakan inventarisasi BMN di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	20%
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	75%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp 253,550,000
2	Layanan Perkantoran	Rp 27,071,716,000
3	Layanan Sarana Internal	Rp 636,725,000
	Jumlah	Rp 27,961,991,000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ASISTEN PEMBINAAN,

(J. DEVY SUDARSO)

(ATIK RUSMIATY AMBARSARI)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOHD SETIA BUDI, A.Md
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN PEMBINAAN

ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H.
NIP.197308081997032007

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

MOHD SETIA BUDI, A.Md
NIP.198202252008121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pemeliharaan Inventaris Kantor	Melakukan Pemeliharaan Terhadap Barang barang inventaris Kantor	100 Kegiatan/ Tahun
2	Mengelola Surat masuk dan Surat Keluar	Meninjak Lanjuti Surat Masuk	250 Surat/ Tahun
3	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	Mengelola transfer masuk dari Kejangung dan transfer Keluar ke daerah	2 Kegiatan
4	Layanan sarana dan prasarana	Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Kegiatan

No	Rincian Output	Anggaran
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp.6.182.890.000
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.636.725.000
	Jumlah	Rp.6.819.615.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

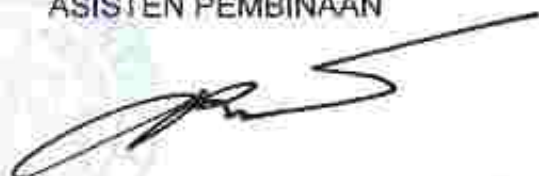
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 1^o September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN PEMBINAAN


ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H.
NIP.197308081997032007

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM


MOHD SETIA BUDI, A.Md
NIP.198202252008121003



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUS SUSENO
Jabatan : KAUR RUMAH TANGGA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHD SETIA BUDI, A.Md
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 15 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

MOHD SETIA BUDI, A.Md
NIP.198202252008121003

Pihak Pertama,

KAUR PERLENGKAPAN DAN BMN

AGUS SUSENO
NIP.198912122010121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAUR RUMAH TANGGA

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pemeliharaan Kantor	Melakukan Pemeliharaan berupa Pengecatan Kantor secara berkala	20 Kegiatan/ Tahun
2	Pemeliharaan Halaman Kantor	Melakukan Pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor	24 Kegiatan/ Tahun

No	Rincian Output	Anggaran
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp.6.182.890.000
2		
	Jumlah	Rp.6.182.890.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 15 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

KAUR PERLENGKAPAN DAN BMN



MOHD SETIA BUDI, A.Md
NIP.198202252008121003

AGUS SUSENO
NIP.198912122010121002



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WENY ADRIAN, S.Sos.
Jabatan : KAUR PERLENGKAPAN DAN BMN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOHD SETIA BUDI, A.Md
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

MOHD SETIA BUDI, A.Md
NIP.198202252008121003

Pihak Pertama,

KAUR PERLENGKAPAN DAN BMN

WENY ADRIAN, S.Sos.
NIP.198601132010121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAUR PERLENGKAPAN DAN BMN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pemeliharaan Inventaris Kantor	Melakukan Pemeliharaan Terhadap Barang barang inventaris Kantor	100 Kegiatan/ Tahun
2	Mengelola Surat masuk dan Surat Keluar	Meninjau Lanjuti Surat Masuk	250 Surat/ Tahun
3	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	Mengelola transfer masuk dari Kejagung dan transfer Keluar ke daerah	2 Kegiatan

No	Rincian Output	Anggaran
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp.6.182.890.000
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.636.725.000
Jumlah		Rp.6.819.615.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 1^o September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM



MOHD SETIA BUDI, A.Md
NIP.198202252008121003

Pihak Pertama,

KAUR PERLENGKAPAN DAN BMN



WENY ADRIAN, S.Sos.
NIP.198601132010121001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPARMAN, S.Sos., S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Pinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Asisten Pembinaan,

(ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

(SUPARMAN, S.Sos., S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
PADA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan rencana dan program kerja kepegawaian	Presentase penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan rencana dan program kerja kepegawaian	80%
2	Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi pegawai	Presentase penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi pegawai	95%
3	Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan pegawai	Presentase penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan pegawai	95%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Pelaksanaan urusan jabatan fungsional jaksa dan jabatan fungsional lainnya	Presentase pelaksanaan urusan jabatan fungsional jaksa dan jabatan fungsional	98%
5	Penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organisasi dan analisis jabatan	Presentase penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organisasi dan analisis jabatan	100%
6	Pelaksanaan urusan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai	Presentase pelaksanaan urusan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai	100%
7	Penyiapan bahan usulan pengangkatan, kepangkatan, pensiun dan pemberhentian pegawai	Presentase penyiapan bahan usulan pengangkatan, kepangkatan, pensiun dan pemberhentian	100%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Kegiatan pengembangan kepegawaian	Rp112.277.000
	Jumlah	Rp112.277.000

D. PRIORITAS NASIONAL

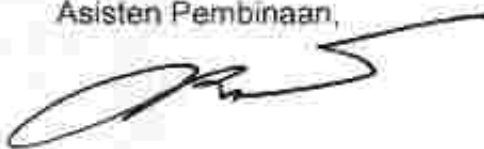
E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjung Pinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

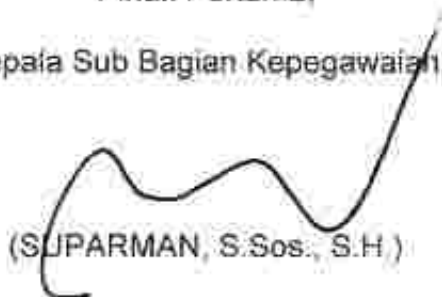
Asisten Pembinaan,



(ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Kepegawaian,



(SUPARMAN, S.Sos., S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIDIT ISWADI, S.Kom.
Jabatan : Kepala Urusan Kepangkatan dan Mutasi Pegawai pada Subbagian Kepegawaian Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPARMAN, S.Sos., S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN,

(SUPARMAN, S.Sos., S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN KEPANGKATAN DAN
MUTASI PEGAWAI,

(DIDIT ISWADI, S.Kom.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN KEPANGKATAN DAN MUTASI PEGAWAI**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alami, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, usulan penempatan, pemberhentian dan pensiun pegawai	Persentase penyiapan bahan usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan, pemberhentian dan pensiun	85%
2	Terwujudnya pegawai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar	Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan pegawai	85%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi pegawai	Persentase penyiapan bahan dan pelaksanaan mutasi pegawai	85%
4	Pelaksanaan urusan jabatan fungsional Jaksa dan jabatan fungsional lainnya	Persentase pelaksanaan urusan jabatan fungsional Jaksa dan jabatan fungsional lainnya	85%
5	Penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organisasi dan analisis jabatan	Persentase penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organisasi dan analisis jabatan	85%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Kegiatan pengembangan kepegawaian	Rp112.227.000
	Jumlah	Rp112.227.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN,

KEPALA URUSAN KEPANGKATAN DAN
MUTASI PEGAWAI,

(SUPARMAN, S.Sos., S.H.)

(DIDIT ISWADI, S.Kom.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUSUMA SETIYOWATI, A.Md.
Jabatan : Kepala Urusan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai pada Subbagian Kepegawaian Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUPARMAN, S.Sos., S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sehanusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN,

(SUPARMAN, S.Sos., S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN PENGEMBANGAN DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI,

(KUSUMA SETIYOWATI, A.Md.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA URUSAN KEPANGKATAN DAN MUTASI PEGAWAI**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, usulan penempatan, pemberhentian dan pensiun pegawai	Persentase penyiapan bahan usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan, pemberhentian dan pensiun	85%
2	Terwujudnya pegawai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar	Persentase penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan pegawai	85%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi pegawai	Persentase penyiapan bahan dan pelaksanaan mutasi pegawai	85%
4	Pelaksanaan urusan jabatan fungsional Jaksa dan jabatan fungsional lainnya	Persentase pelaksanaan urusan jabatan fungsional Jaksa dan jabatan fungsional lainnya	85%
5	Penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organisasi dan analisis jabatan	Persentase penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organisasi dan analisis jabatan	85%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Kegiatan pengembangan kepegawaian	Rp112.227.000
	Jumlah	Rp112.227.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN,

(SUPARMAN, S.Sos., S.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN PENGEMBANGAN DAN
KESEJAHTERAAN PEGAWAI,

(KUSUMA SETIYOWATI, A.Md.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Hariyanti, S.E., S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Atik Rusmiaty Ambarsari, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 11 September 2025

Pihak Kedua,

Asisten Pembinaan,

Atik Rusmiaty Ambarsari, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Keuangan,

Tri Hariyanti, S.E., S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akseferasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	90
		Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	70%
		Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)	90%
3	Meningkatnya akuntabilitas	Persentase satker yang	70%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Kejaksaan RI	menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mempertahankan Wajar tanpa Pengecualian (WTP)	

No	Rincian Output	Anggaran
1	Gaji dan Tunjangan	Rp 20.888.826.000
	Jumlah	Rp 20.888.826.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 11 September 2025

Pihak Kedua,

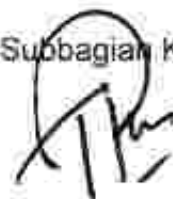
Asisten Pembinaan,



Atik Rusmiaty Ambarsari, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Keuangan,



Tri Haryanti, S.E., S.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Perry Ritonga, S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Atik Rusmiaty Ambarsari, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Asisten Pembinaan,

Atik Rusmiaty Ambarsari, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Perencanaan,

Perry Ritonga, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PADA ASISTEN BIDANG PEMBINAAN
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI	Jumlah Satker di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM	2
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dari masing-masing Satker	75
3	Tersajinya bahan/data kinerja yang akurat dan	Persentase penyelesaian buku Laporan Kinerja Instansi	95%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemerintah (LKJIP)	
4	Tersajinya data pada aplikasi E-Monev Bappenas, SMART Kemenkeu, dan E-Sakip PanRB secara berkala	Persentase penyelesaian data kinerja Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau pada aplikasi E-Monev Bappenas, SMART Kemenkeu, dan E-Sakip PanRB secara berkala	95%
5	Penyusunan dan Penelaahan serta Reviu APIP Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Pagu Alokasi Anggaran Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Pagu Alokasi Anggaran Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026	1 Buku / Laporan

No	Rincian Output	Anggaran
1	Kegiatan Rakerda	Rp 14.500.000
2	Pengumpulan Data RKAKL ke Daerah	Rp 57.750.000
3	Kegiatan Promusrenbang	Rp 6.462.000
	Jumlah	Rp 78.712.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksanaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksanaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksanaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Asisten Pembinaan



Atik Rusmiaty Ambarsari, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

Kepala Subbagian Perencanaan,



Perry Ritonga, S.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAUZAL, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J. DEVY SUDARSO
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

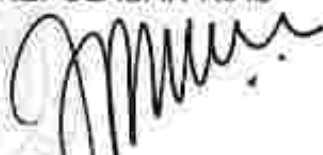
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU



J. DEVY SUDARSO

Pihak Pertama,

ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA,



FAUZAL, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	75%
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum,	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain di wilayah	22

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	4

No	Rincian Output	Anggaran
1	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan TUN	Rp 33.800.000,-
2	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan (perkara)	Rp 57.100.000,-
3	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis (Layanan)	Rp 7.600.000,-
4	Pertimbangan Hukum yang dilakukan pada Kejati	Rp 28.700.000,-
5	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp 21.600.000,-
6	Pengelolaan HALO JPN di Kejati	Rp 7.600.000,-
Jumlah		Rp 156.400.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU



J. DEVY SUDARSO

Pihak Pertama,

ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA



FAUZAL, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANJAYA CHANDRA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN HUKUM

Selanjutnya disebut pihak pertama:

Nama : FAUZAL, S.H.,M.H.
Jabatan : ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,
ASISTEN PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA

FAUZAL, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN
HUKUM,

HANJAYA CHANDRA, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	22
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	4

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pertimbangan Hukum yang dilakukan pada Kejati	Rp 28.700.000,-
6	Pengelolaan HALO JPN di Kejati	Rp 7.600.000,-
Jumlah		Rp 36.300.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA


FAUZAL, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN
HUKUM,


HANJAYA CHANDRA, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARIEF YUNANDI, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAUZAL, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA

FAUZAL, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA,

MUHAMMAD ARIEF YUNANDI, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PERDATA PADA ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	75%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan TUN	Rp 33.800.000,-
2	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan (perkara)	Rp 57.100.000,-
3	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp 21.600.000,-
4	Pengelolaan HALO JPN di Kejati	Rp 7.600.000,-
Jumlah		Rp 120.100.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA

FAUZAL S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA,

MUHAMMAD ARIEF YUNANDI, S.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FAUZAL, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,
ASISTEN PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA

FAUZAL, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
TATA USAHA NEGARA,

ELAN, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PERDATA PADA ASISTEN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
2	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	22

No	Rincian Output	Anggaran
1	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan TUN	Rp 33.800.000,-
2	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan (perkara)	Rp 57.100.000,-
3	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis (layanan)	Rp 7.600.000,-
3	Pengelolaan HALO JPN di Kejati	Rp 7.600.000,-
Jumlah		Rp 106.100.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA



FAUZAL, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI
TATA USAHA NEGARA,



ELAN, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOVANDI YAZID., S.H., M.H..

Jabatan : ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J. DEVY SUDARSO

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU



J. DEVY SUDARSO

Pihak Pertama,

ASISTEN INTELIJEN,



YOVANDI YAZID., S.H., M.H..

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN INTELJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	70
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	70

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	70
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	35
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	70
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	20
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	40

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp157.480.000
2	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan	Rp54.150.000
3	Kegiatan Penelusuran Aset	Rp68.200.000
4	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp51.560.000
5	Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Rp122.980.000
6	Kegiatan/Operasi Intelijen pada Posko Intelijen	Rp55.663.000
7	Penerangan dan Penyuluhan Hukum	Rp193.591.000
Jumlah		Rp703.624.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN


1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 12 September 2025.

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU



J. DEVY SUDARSO

Pihak Pertama,

ASISTEN INTELIJEN KEPULAUAN RIAU,



YOVANDI YAZID., S.H., M.H



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRI SIPAYUNG, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI IV
PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOVANDI YAZID, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN
RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



ASISTEN INTELIJEN,

(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

KASI IV
PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS

(HENDRI SIPAYUNG, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional/Daerah	Jumlah Permohonanan Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional/Daerah	10
No	Rincian Output	Anggaran	
1	Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional/Daerah	Rp. 122.980.000,-	
Jumlah		Rp. 122.980.000,-	

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, **10** September 2025

Pihak Kedua,


ASISTEN INTELIJEN,

(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASI IV
PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS,

(HENDRI SIPAYUNG, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUNIUS ZEGA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI II SOSIAL, BUDAYA DAN PEMASYARAKATAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOVANDI YAZID, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

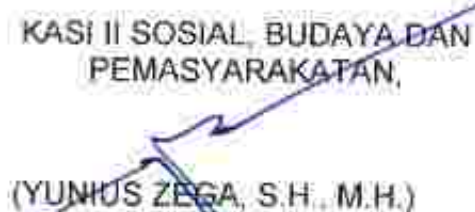
Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN INTELIJEN,

(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASI II SOSIAL, BUDAYA DAN
PEMASYARAKATAN,

(YUNIUS ZEGA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan pemasyarakatan (POSKO KEJAKSAAN)	Presentase meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan pemasyarakatan (POSKO KEJAKSAAN)	12
2	Meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan pemasyarakatan (PAKEM)	Presentase meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan pemasyarakatan (PAKEM)	4

No	Rincian Output	Anggaran
1	Telah melaksanakan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat (POSKO KEJAKSAAN)	Rp. 55.663.000
2	Telah Melaksanakan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat (PAKEM)	Rp. 51.560.000
Jumlah		Rp. 107.223.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN INTELIJEN,

(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASI II SOSIAL, BUDAYA DAN
PEMASYARAKATAN,

(YUNIUS ZEGA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSNAR YUSUF, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOVANDI YAZID, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN
RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN INTELIJEN,



(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU,

(YUSNAR YUSUF, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan Kampanye Anti Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Persentase pelaksanaan kampanye anti korupsi pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	2
2	Meningkatnya pelaksanaan Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Persentase pelaksanaan Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	8

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pelaksanaan Pelayanan Media dan Kehumasan pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Persentase pelaksanaan Pelayanan Media dan Kehumasan pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	6
4	Meningkatnya pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Persentase pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	8
5	Meningkatnya pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan kegiatan Jaksa Menyapa/ OM JAK Menjawab pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Persentase pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan kegiatan Jaksa Menyapa/ OM JAK Menjawab pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	4

No	Rincian Output	Anggaran
1	Terlaksananya Kampanye Anti Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Rp 25.000.000
2	Terlaksananya Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Rp 74.752.000
3	Terlaksananya Pelayanan Media dan Kehumasan pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Rp 17.100.000
4	Terlaksananya Penyuluhan Hukum dengan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Rp 50.000.000
5	Terlaksananya Penyuluhan Hukum dengan kegiatan Jaksa Menyapa/ OM JAK Menjawab pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	Rp 26.739.000
Jumlah		Rp 193.591.000

D. PRIORITAS NASIONAL

1. Pelaksanaan kegiatan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum terhadap Lembaga / Instansi Pemerintahan bagi kalangan masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatann Jaksa Masuk Sekolah untuk tenaga pendidik dan Siswa/Siswi Sekolah.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN INTELIJEN,



(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU,

(YUSNAR YUSUF, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **KADEK AGUS AW, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI III EKONOMI DAN KEUANGAN KEJAKSAAN
TINGGI KEPULAUAN RIAU.**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YOVANDI YAZID, S.H., M.H.**
Jabatan : **ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua


ASISTEN INTELIJEN,
(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASI III EKONOMI DAN KEUANGAN,

(KADEK AGUS AW, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan (Laporan Aduan)	Presentase meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan (Laporan Aduan)	12 LID/PAM/GAL
2	Meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan (Permohonan Pelacakan Aset)	Presentase meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan (Permohonan Pelacakan Aset)	12 LID/PAM/GAL

No	Rincian Output	Anggaran
1	Telah melaksanakan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan (Laporan Aduan)	Rp. 57.100.000
2	Telah Melaksanakan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan (Permohonan Pelacakan Aset)	Rp. 68.200.000
Jumlah		Rp. 125.300.000

D. PRIORITAS NASIONAL

- Tim Pemberantasan Mafia Pelabuhan Dan Bandar Udara
- Tim Pemberantasan Mafia Tanah
- Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN INTELIJEN,

 (YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASI III EKONOMI DAN KEUANGAN,

 (KADEK AGUS AW, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROBINSON SIHOMBING, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI I IDEOLOGI, POLITI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOVANDI YAZID, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

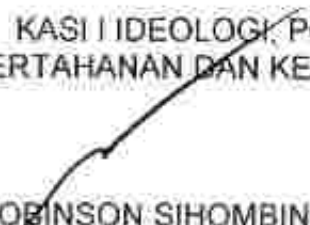
Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN INTELIJEN,

(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASI I IDEOLOGI, POLITI,
PERTAHANAN DAN KEAMANAN,

(ROBINSON SIHOMBING, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanaan dan penggalangan (PAM Pimpinan)	Presentase Meningkatkan pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanaan dan penggalangan (PAM Pimpinan)	12 LID/PAM/GAL

No	Rincian Output	Anggaran
1	Telah melaksanakan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan dan penggalangan (PAM Pimpinan)	Rp. 57.100.000
	Jumlah	Rp. 57.100.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.


Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN INTELIJEN,

(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASI IDEOLOGI, POLITI,
PERTAHANAN DAN KEAMANAN,

(ROBINSON SIHOMBING, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADITYO UTOMO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN PRODUKSI
INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : YOVANDI YAZID, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN
RIAU


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,
ASISTEN INTELIJEN,

(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KASI V,

(ADITYO UTOMO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pencarian Buron Tindak Pidana / DPO	Jumlah DPO yang sudah ditangkap dan diamankan	4

No	Rincian Output	Anggaran
1	Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO	Rp157.480.000
	Jumlah	Rp157.480.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 12 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN INTELIJEN,

(YOVANDI YAZID, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASI V,

(ADITYO UTOMO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : OLAN LAURENCE HASIHOLAN PASARIBU, S.H., M.H.
Jabatan : pjt. ASISTEN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J. DEVY SUDARSO
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

(J. DEVY SUDARSO)

Pihak Pertama,

pjt. ASISTEN PEMULIHAN ASET,

(OLAN LAURENCE HASIHOLAN
PASARIBU, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ASISTEN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	85
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	85
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	80

No	Rincian Output	Anggaran
1	Belanja Bahan	Rp 20.300.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 179.700.000
	Jumlah	Rp 200.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPUDJARAN RIA

(J. DEWY SUDARSO)

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Pertama

PIH. ASISTEN PEMULIHAN ASET,

(OLAN LAURENCE HASIROLAN
PASARIBU, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDREAS TARIGAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENELUSURAN DAN PERAMPASAN
ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : OLAN LAURENCE HASIHOLAN PASARIBU, S.H., M.H.
Jabatan : pIt ASISTEN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

pIt ASISTEN PEMULIHAN ASET,

(OLAN LAURENCE
HASIHOLAN PASARIBU, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBIDANG PENELUSURAN
DAN PERAMPASAN ASET,

(ANDREAS TARIGAN, S.H., M.H.)

A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	85
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	85

A

No	Rincian Output	Anggaran
1	Belanja Bahan	Rp 20.300.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 179.700.000
	Jumlah	Rp 200.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua

Plt. ASISTEN PEMULIHAN ASET,

(JOHAN LAURENCE HASIHOLAN
PASARIBU, S.H., M.H.)

Pihak Pertama

KEPALA SUBBIDANG PENELUSURAN
DAAN PERAMPASAN ASET,

(ANDREAS TARIGAN, S.H., M.H.)

A



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, S.H., M.H.
Jabatan : plt. KEPALA SUBBIDANG MANAJEMEN PENGELOLAAN
ASET

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : OLAN LAURENCE HASIHOLAN PASARIBU, S.H., M.H.
Jabatan : plt. ASISTEN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

plt. ASISTEN PEMULIHAN ASET,

(OLAN LAURENCE
HASIHOLAN PASARIBU, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

plt. KEPALA SUBBIDANG MANAJEMEN
PENGELOLAAN ASET,

(DAVID ROGER JULIUS
PAKPAHAN, S.H., M.H.)

11

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peringkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	80

1

No	Rincian Output	Anggaran
1	Belanja Bahan	Rp 20.300.000
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 179.700.000
	Jumlah	Rp 200.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL


E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,
plt. ASISTEN PEMULIHAN ASET,

(MILAN LAURENCE HASIHOLAN
PASARIBU, S.H., M.H.)

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Pertama,
plt. KEPALA SUBBIDANG
MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET,

(DAVID ROGER JULIUS
PAKPAHAN, S.H., M.H.)

4



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUKHAROM, SH., MH
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : J. DEVY SUDARSO
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

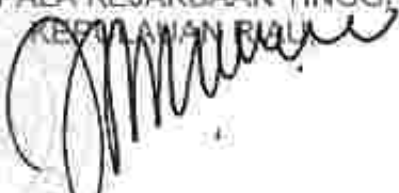
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 09 September 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU



(J. DEVY SUDARSO)

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,



(MUKHAROM, SH., MH.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan	70%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		pada tahap penyidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	80%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	85%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejati (Perkara)	Rp184.164.000
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejati (Perkara)	Rp515.000.000

3	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati (Perkara)	Rp185.400.000
4	Eksaminasi	Rp25.000.000
5	Supervis	Rp29.800.000
6	Dukungan Teknis	Rp27.700.000
Jumlah		Rp967.064.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,



(J. DEVY SUDARSO)



(MUKHAROM, SH., MH.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YONGKI ARVIUS, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BIDANG TINDAK PIDANA
KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUKHAROM, S.H., M.H
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 9 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,

(MUKHAROM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN,

(YONGKI ARVIUS, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap	70%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		penyidikan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejati (Perkara)	Rp184.164.000
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejati (Perkara)	Rp515.000.000
	Jumlah	Rp699.164.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,

(MUKHAROM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN,

(YONGKI ARVILUS, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AJI SATRIO PRAKOSO, SH., MH.
Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNTUTAN BIDANG TINDAK PIDANA
KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUKHAROM, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 09 September 2025.

Pihak Kedua,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,

(MUKHAROM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENUNTUTAN,

(AJI SATRIO PRAKOSO, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap	70%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%

No	Rincian Output	Anggaran
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejati (Perkara)	Rp185.400.000
	Jumlah	Rp185.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,

KEPALA SEKSI PENUNTUTAN

(MUKHAROM, S.H., M.H.)

(AJI SATRIO PRAKOSO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI UPAYA HUKUM LUAR BIASA, EKSEKUSI,
DAN EKSAMINASI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUKHAROM, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN TINDAK PIDANA
KHUSUS,

(MUKHAROM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI UPAYA HUKUM LUAR
BIASA, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI

(ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	80%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus di wilayah	85%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Eksaminasi	Rp25.000.000
2	Supervisi	Rp29.800.000
3	Dukungan Teknis	Rp27.700.000
	Jumlah	Rp82.500.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 09 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ASISTEN TINDAK PIDANA
KHUSUS,

KEPALA SEKSI UPAYA HUKUM LUAR
BIASA, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI

(MUKHAROM, S.H., M.H.)

(ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALLAN HENRY BASKARA HARAHAP, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUKHAROM, S.H., M.H.
Jabatan : ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 9 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASI

(MUKHAROM, S.H., M.H.)

(ALLAN HENRY BASKARA H., S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PEMERIKSA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	70%

No	Rincian Output	Anggaran
1	-	-
	Jumlah	=

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 9 September 2025

Pihak Kedua,

ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS,



(MUKHABOM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
OPERASI,



(ALLAN HENRY BASKARA H, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DORA SISKI DEWI, S.H.
Jabatan : Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 September 2025



Pihak Kedua,

(ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

(DORA SISKI DEWI, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan pada Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berbasis TI	Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT	14 kegiatan
2	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pelayanan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, kerjasama dan hubungan luar negeri serta perpustakaan dan	Jumlah layanan perpustakaan dan dokumentasi hukum	12 bulan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kegiatan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi	Jumlah layanan pengelolaan data dan statistik kriminal	12 bulan
4.	Meningkatnya kegiatan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi	Persentase satuan kerja yang menggunakan CMS dalam rangka Implementasi SPPT-TI	100%

No	Rincian Output / Sub Komponen	Anggaran
1	SIMKARI DAN PERPUSTAKAAN	Rp. 12.250.000,-
	Jumlah	Rp. 12.250.000,-

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Tanjungpinang, 10 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan
Tinggi Kepulauan Riau**

**Kepala Subbagian Data Statistik
Kriminal dan Teknologi Informasi dan
Perpustakaan pada Asisten Bidang
Pembinaan Kejaksaan Tinggi
Kepulauan Riau**



(ATIK RUSMIATY AMBARSARI, S.H., M.H)

(DORA SISKA DEWI, S.H.)